

## 13 WARGA KORBAN BENCANA ALAM DI BANJARNEGARA, TERIMA BANTUAN SOSIAL



Sumber Gambar:

<https://serayunews.pw/wp-content/uploads/2024/06/IMG-20240604-WA0043-jpg.webp>

### Isi Berita:

SERAYUNews– Sedikitnya 13 warga Banjarnegara yang menjadi korban bencana, menerima bantuan sosial dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Selasa (4/6/2024). Bantuan tersebut untuk korban bencana yang rumahnya roboh dan rusak berat.

Kepala Pelaksana BPBD Banjarnegara, Aris Sudaryanto mengatakan, bantuan untuk keluarga yang rumahnya roboh masing-masing menerima Rp 15 juta. Sedangkan untuk yang rumahnya mengalami rusak berat, mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 10 juta. “Total bantuan sosial ini sebesar Rp 180 juta yang terdiri dari 9 orang dan satu musala yang menerima bantuan Rp 15 juta. Tiga orang menerima bantuan masing-masing sebesar Rp 10 juta,” ujarnya.

Bantuan tersebut, berasal dari pemerintah provinsi yang mengambil dari Data Tak Terduga (DTT). Para korban yang menerima bantuan terdiri dari beberapa wilayah yang ada di Banjarnegara seperti Desa Gumelem, Kecamatan Susukan. Kemudian Desa Klapa, dan Desa Tlaga Kecamatan Punggelan, Desa Pasegeran, Kecamatan Pandanarum, dan Desa Sidengok Kecamatan Pejawaran.

“Penerima bantuan adalah mereka yang mengalami musibah akibat bencana selama tahun 2024. Sedangkan bantuan mushala ada di Desa Tlaga Kecamatan Punggelan,” ujarnya.

## **Puluhan Rumah Roboh**

Berdasarkan data dari BPBD Banjarnegara, selama tahun 2024, bencana yang melanda Banjarnegara terjadi di beberapa wilayah. Seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Pagentan 41 rumah roboh dan rusak berat. Kemudian Banjarmangu 8 rumah, dan Kecamatan Punggelan 4 rumah.

“Untuk korban bencana ini sedang pengajuan bantuan pembangunan baru dengan besaran bantuan senilai Rp 50 juta. Hanya saja penerima bantuan harus sudah memiliki tanah dan sudah masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial,” katanya.

Sementara itu, Pj Bupati Banjarnegara Muhamad Masrofi mengatakan, dari data yang ada, bencana longsor yang terjadi di Banjarnegara ini menyebabkan sedikitnya 45 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal.

Pada saat seperti ini, sentuhan dan bantuan sangat di butuhkan. Pemerintah berusaha hadir memberikan bantuan, untuk mempercepat proses pemulihan dan meringankan beban korban.

“Bantuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam proses pemulihan. Dari bantuan ini, setidaknya bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Semoga bantuan ini dapat bermanfaat, sesuai dengan kebutuhan yang mendesak,” katanya.

## **Sumber Berita:**

1. <https://serayunews.com/13-warga-korban-bencana-alam-di-banjarnegara-terima-bantuan-sosial>, “13 Warga Korban Bencana Alam di Banjarnegara, Terima Bantuan Sosial”, tanggal 4 Juni 2024.
2. <https://radarbanyumas.disway.id/read/108069/13-warga-korban-bencana-di-banjarnegara-terima-bansos>, “13 Warga Korban Bencana di Banjarnegara Terima Bansos”, tanggal 5 Juni 2024.
3. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/497943/serahkan-bantuan-korban-bencana-begini-pesan-pj-bupati-banjarnegara>, “Serahkan Bantuan Korban Bencana, Begini Pesan Pj Bupati Banjarnegara”, tanggal 4 Juni 2024.

## **Catatan:**

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.<sup>1</sup> Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 55 ayat 1

- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.<sup>3</sup> Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.<sup>4</sup> Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>6</sup>
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
    - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*